



**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR M.HH-4.HN.03.08 TAHUN 2022

TENTANG

**PENETAPAN ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL
YANG TERINTEGRASI DENGAN PORTAL *JDIHN.GO.ID* TAHUN 2022**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mengelola dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah dan cepat yang tersebar di berbagai instansi pemerintah dan institusi lainnya, perlu membangun kerja sama dalam suatu jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional yang terpadu dan terintegrasi melalui portal *jdihn.go.id* sebagai pusat data dokumentasi dan informasi hukum nasional;
 - b. bahwa upaya pengintegrasian *database* anggota jaringan membutuhkan sebuah daya upaya yang sungguh-sungguh dan kerja sama yang baik dengan anggota jaringan sehingga perlu memberikan penghargaan bagi Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang telah mengintegrasikan *database* dokumen hukum dengan Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Penetapan Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang Terintegrasi dengan Portal *jdihn.go.id* Tahun 2022;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 2. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
 3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);

MEMUTUSKAN:...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PENETAPAN ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL YANG TERINTEGRASI DENGAN PORTAL *JDIHN.GO.ID* TAHUN 2022.
- KESATU : Menetapkan Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang Terintegrasi dengan Portal *jdihn.go.id* Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Memberikan piagam penghargaan kepada Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang Terintegrasi dengan Portal *jdihn.go.id* Tahun 2022.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan seperlunya.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada setiap penerima penghargaan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 September 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,
YASONNAH. LAOLY



Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Para Menteri Kabinet Kerja;
3. Para Pimpinan Lembaga Negara;
4. Para Pimpinan Lembaga Pemerintahan Non-Kementerian;
5. Gubernur seluruh Indonesia;
6. Bupati seluruh Indonesia;
7. Walikota seluruh Indonesia;
8. Pimpinan Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
9. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia seluruh Indonesia;
10. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI
NOMOR : M.HH-4.HN.03.08 TAHUN 2022
TANGGAL : 27 September 2022

**DAFTAR PENETAPAN ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL
YANG TERINTEGRASI DENGAN PORTAL *JDIHN.GO.ID* TAHUN 2022**

NO.	ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM	
	LEMBAGA NON STRUKTURAL	
1.	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	
2.	Komisi Pengawas Persaingan Usaha	
	PEMERINTAH KABUPATEN	
3.	Kabupaten Asmat	Papua
4.	Kabupaten Biak Numfor	Papua
5.	Kabupaten Boven Digoel	Papua
6.	Kabupaten Deiyai	Papua
7.	Kabupaten Dogiyai	Papua
8.	Kabupaten Intan Jaya	Papua
9.	Kabupaten Lanny Jaya	Papua
10.	Kabupaten Mamberamo Raya	Papua
11.	Kabupaten Manokwari Selatan	Papua Barat
12.	Kabupaten Nabire	Papua
13.	Kabupaten Paniai	Papua
14.	Kabupaten Pegunungan Bintang	Papua
15.	Kabupaten Sarmi	Papua
16.	Kabupaten Sekadau	Kalimantan Barat
17.	Kabupaten Supiori	Papua
18.	Kabupaten Tolikara	Papua
19.	Kabupaten Waropen	Papua
20.	Kabupaten Yahukimo	Papua

NO.	ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM	
21.	Kabupaten Yalimo	Papua
	PEMERINTAH KOTA	
22.	Kota Jayapura	Papua
	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI	
23.	DPRD Provinsi Papua	Papua
	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN	
24.	DPRD Kabupaten Asmat	Papua
25.	DPRD Kabupaten Bengkayang	Kalimantan Barat
26.	DPRD Kabupaten Biak Numfor	Papua
27.	DPRD Kabupaten Boven Digoel	Papua
28.	DPRD Kabupaten Fak Fak	Papua Barat
29.	DPRD Kabupaten Jayapura	Papua
30.	DPRD Kabupaten Kaimana	Papua Barat
31.	DPRD Kabupaten Keerom	Papua
32.	DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen	Papua
33.	DPRD Kabupaten Landak	Kalimantan Barat
34.	DPRD Kabupaten Lanny Jaya	Papua
35.	DPRD Kabupaten Manokwari Selatan	Papua Barat
36.	DPRD Kabupaten Mempawah	Kalimantan Barat
37.	DPRD Kabupaten Merauke	Papua
38.	DPRD Kabupaten Nduga	Papua
39.	DPRD Kabupaten Puncak	Papua
40.	DPRD Kabupaten Sarmi	Papua
41.	DPRD Kabupaten Sintang	Kalimantan Barat
42.	DPRD Kabupaten Teluk Wondama	Papua Barat

NO.	ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM	
	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA	
43.	DPRD Kota Jayapura	Papua
	PERGURUAN TINGGI	
44.	STIH Awang Long	Kalimantan Timur
45.	Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma	DKI Jakarta
46.	Universitas Muhammadiyah Kotabumi	Lampung
47.	Universitas Pancasakti Tegal	Jawa Tengah
48.	Universitas Pancasila	DKI Jakarta
49.	Universitas Pasir Pengaraian	Riau
50.	Universitas Tidar	Jawa Tengah
51.	Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda	Kalimantan Timur
52.	Universitas Yarsi	DKI Jakarta
53.	Institut Teknologi Bandung	Jawa Barat
	SATUAN KERJA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	
54.	Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Utara	


MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

YASONNA H. LAOLY